

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Kelancaran aksesibilitas dan kenyamanan penggunaan jalan juga akan meningkatkan efisiensi dari pengguna jalan tersebut, baik dari segi waktu dan juga biaya. Oleh karena itu penyelenggaraan infrastruktur jalan adalah salah satu agenda penting pada setiap tingkat pemerintahan.

Jalan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapainya keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional (UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan).

Pada sisi lain proses penyelenggaraan jalan yang tidak tepat juga dapat memberikan dampak negatif, terutama untuk lingkungan hidup. Salah satunya pemakaian sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Secara umum sektor konstruksi menggunakan 50% sumber daya alam, 40% energi dan 16% air (Widjanarko, 2009). Lambat laun hal ini akan menjadi perhatian serius yang harus diaplikasikan dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur jalan. Karena kebutuhan akan infrastruktur jalan terus meningkat, maka kontrol dampak lingkungan dan upaya meminimalisir dampak lingkungan harus lebih diperhatikan.

Tertuang dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah merencanakan pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, jalan tol sepanjang 1.000 km dan pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km (Bappenas, 2014). Dalam pelaksanaannya perencanaan ini akan menyerap sumber daya alam yang banyak sebagai material utama dan pendukung pembangunan jalan tersebut.

Selain berkurangnya sumber daya alam yang tak terbarukan, proses penyelenggaraan jalan juga dapat memberikan efek negatif lainnya terhadap

lingkungan. Beberapa efek negatif tersebut yaitu meningkatnya emisi pada proses konstruksi dan pemeliharaan, peningkatan limbah yang dihasilkan pada proses konstruksi, berkurangnya lahan produktif akibat pembukaan jalan baru, rusaknya ekosistem dan berbagai dampak lingkungan yang efeknya bisa dirasakan langsung ataupun dikemudian hari. Akumulasi dari dampak lingkungan tersebut secara perlahan akan menurunkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Pesatnya pembangunan konstruksi jalan harus mempertimbangkan potensi dampak lingkungan yang terjadi. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan dan memiliki fungsi sebagai regulator memiliki tanggung jawab penuh untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Beberapa aturan telah dikeluarkan untuk mengawal penyelenggaraan jalan tersebut dari segi dampak lingkungan. Pedoman tersebut tertuang dalam tingkatan aturan pemerintahan seperti Undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah dan Spesifikasi Umum dan NSPM (Norma, Standar, Pedoman dan Manual) lainnya. Aturan-aturan tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian infrastruktur jalan dan lingkungan hidupnya.

Sama halnya dengan Kota/Kabupaten lainnya, di Kota Payakumbuh tanggung jawab penyelenggaraan jalan berada pada Instansi Pemerintahan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan jalan kota yang dilakukan oleh dinas terkait sangat bergantung kepada kesiapan SDM (sumber daya manusia) dan ketersediaan anggaran pemerintah. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran menyebabkan instansi yang bersangkutan tidak begitu leluasa dalam memenuhi target pembangunan infrastruktur jalan yang ideal sesuai dengan NSPM yang berlaku. Hal ini juga sangat berpengaruh untuk terselenggaranya jalan yang ramah lingkungan.

Salah satu konsep jalan ramah lingkungan yang dikenal yaitu konsep *green road*. Adapun pengertian dari *green road construction* (konstruksi jalan hijau) adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi yang didasarkan pada dokumen kontrak untuk meminimalkan dampak negatif proses konstruksi

terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang (Glavinich, 2008 dalam Umar, 2015).

Penerapan konsep jalan yang ramah lingkungan pada penyelenggaraan jalan haruslah dapat kita lihat pada dokumen-dokumen pemerintahan terkait. Dokumen yang dimaksud merupakan pedoman aplikatif yang digunakan pada setiap siklus penyelenggaraan jalan. Tahapan siklus penyelenggaraan jalan yang mengacu pada Permen PUPR No. 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Konten analisis Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman Pasal 3(3) dapat disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan infrastruktur jalan meliputi pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta pembongkaran. Rangkaian tahapan tersebut dapat berkontribusi langsung dalam mengkonten analisis konsep *green road*. Selain berisikan NSPM terkait dokumen-dokumen penyelenggaraan harus mengatur tentang aturan dan kebijakan dampak lingkungan dengan tegas dan aplikatif.

Oleh karena itu diperlukan suatu sistim penilaian yang jelas dan terukur sebagai pedoman konten analisis *green road* pada setiap dokumen penyelenggaraan jalan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai konten analisis *green road* pada dokumen kontrak konstruksi jalan Kota Payakumbuh.

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran konten analisis *green road* pada dokumen penyelenggaraan jalan Kota Payakumbuh.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota tentang penerapan konsep *green road* dalam kontrak konstruksi penyelenggaraan jalan Kota Payakumbuh

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini khusus dilakukan pada dokumen kontrak konstruksi penyelenggaraan jalan Kota Payakumbuh,
- b. Analisis dan pengukuran dilakukan terhadap dokumen kontrak Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Payakumbuh dengan nilai diatas 4 milyar rupiah.
- c. Data-data sekunder yang digunakan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
- d. Kriteria penilaian *green road* menggunakan SE Menteri PUPR, Nomor 04/SE/M/2018 tentang Pedoman Pemeringkatan Jalan Hijau.
- e. Menggunakan metoda konten analisis kualitatif yang memungkinkan peneliti melakukan kategorisasi terhadap objek penelitian.

